

RENCANA KINERJA (RENJA)

KECAMATAN MARITENGGAE



PEMERINTAH KABUPATEN

SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT serta limpahan rahmat dan hidayahNYA kepada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dapat terlaksana secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. Begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Renja Kecamatan Maritengngae masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pangkajene, 03 Agustus 2022
CAMAT MARITENGGAE

Drs. MUSTARI KADIR, M. Si

NIP: 19680119 199112 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	17
3.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	34
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	36
4.2. Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	43
BAB V. PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang	35
Tabel 2.	Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang	43
Tabel 3.	Formulasi Pengukuran Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang	46

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra kecamatan Maritengngae tahun 2019 s/d 2023	8
Lampiran 2. Pencapaian kinerja pelayanan kecamatan Maritengngae	14
Lampiran 3. Review terhadap rancangan awal rkpd tahun 2022	18
Lampiran 4. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022	25
Lampiran 5. Rumusan rencana program dan kegiatan kecamatan Maritengngae tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2024	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Pembangunan merupakan proses yang berjalan secara stimulan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan yang diharapkan di masa depan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, sedangkan pengendalian merupakan proses pengarahan kegiatan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan evaluasi merupakan aktifitas menilai hasil yang terjadi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan bersama. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Maritengngae mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Maritengngae dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap tahun. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi

kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Maritengngae. Sejalan dengan itu, muatan Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Renja Kecamatan Maritengngae tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Maritengngae dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maritengngae dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang organisasi Perangkat Daerah Kecamatan serta Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menjabarkan Perubahan Renstra Kecamatan Maritengngae tahun 2018 – 2023 yang merupakan perencanaan satu periode (5 tahun) ke dalam perencanaan yang sifatnya tahunan (1 tahun).

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menyiapkan Acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maritengngae;
- Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Maritengngae
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

RENSTRA Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan program kerja kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2022 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang mencakup Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terdiri dari dua Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari tiga sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan serta Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencakup Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari tiga Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa, serta Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2022 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 29.

TABEL TC-29. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2022) TARGET APBD	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2022		CAT.
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11	12
7	Unsur Kewilayahan										
7	01 Kecamatan										
7	.01 .02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	0	0	0	0	100	100	100	
7	.01 .02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	0	0	0	0	100	100	100	
7	.01 .02 2.04 .02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	0	0	0	0,00	1	1	50,00	

7	.01	.02	2.04	.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Laporan	0	0	0	0,00	1	1	50,00
7	.01	.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	0	100	100	100	100%	100%	100
7	.01	.03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	0	100	100	100	100	100	100
7	.01	.03	2.01	.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	0	0	0	0,00	1	1	50,00
7	.01	.03	.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	100	100	100	100	100	100	100
7	.01	.03	.2.02	.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	76	Unit	0	28	28	100,00	25	51	67,10
7	.01	.03	.2.02	.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.073	Orang	1.084	1.315	1.315	100,00	1.652	4.051	57,27
7	.01	.03	.2.02	.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	14	Laporan	0	0	0	0,00	7	7	50,00
7	.01	.06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	0	0	0	0	100	100	100,00
7	.01	.06	.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	0	0	0	0	100	100	100,00

7	.01	.06	.2.01	.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15	Dokumen	0	0	0	0,00	5	5	33,33	
7	.01	.06	.2.01	.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15	Dokumen	0	0	0	0,00	5	5	33,33	
7	.01	.06	.2.01	.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15	Dokumen	0	0	0	0,00	5	5	33,33	
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%	0	100	100	100	100%	100%	
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		%	0	100	100	100	100	100	
X	XX	01	2.02	.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70	Bulan	14	14	14	100,00	14	42	60,00	
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	0	100	100	100	100	100	100	
X	XX	01	2.06	.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	1	1	1	100,00	1	3	100,00	
X	XX	01	2.06	.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	145	Unit	47	45	45	100,00	47	139	95,86	
X	XX	01	2.06	.04	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	210	Unit	48	80	80	100,00	60	188	89,52	

X	XX	01	2.06	.05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	56.500 Lembar	11.457	11.200	11.200	100,00	11.390	34.047	60,26	
X	XX	01	2.06	.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Bulan	12	12	12	100,00	12	36	60,00	
X	XX	01	2.06	.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1250 Kali	64	70	15	21,43	55	134	10,72	
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	0	100	100	100	100	100	
X	XX	01	2.07	.05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	1	0	0	0	1	2	40,00	
X	XX	01	2.07	.09	XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	3	3	3	100,00	2	8	80,00	
X	XX	01	2.07	.10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	215 Unit	30	42	42	100,00	45	117	54,41	
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	0	100	100	100	100	100	
X	XX	01	2.08	.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4243 Lembar	810	820	820	100,00	903	2533	59,69	
X	XX	01	2.08	.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	12	12	12	100,00	12	36	60,00	
X	XX	01	2.08	.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	12	12	12	100,00	12	36	60,00	
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	0	100	100	100	100	100	

X	XX	01	2.09	.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	175	Unit	35	35	35	100,00	35	105	60,00	
X	XX	01	2.09	.05	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78	Unit	10	16	16	100,00	16	42	53,84	
X	XX	01	2.09	.06	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	0	5	5	100,00	4	9	60,00	
X	XX	01	2.09	.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	20	Unit	0	5	5	100,00	3	8	32,00	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara kelembagaan, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Maritengngae diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada renstra. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Maritengngae tahun 2022 yaitu; 1). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 81,25 dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 80 dan, 2). Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%, 3) Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%, dan 4) Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada Tabel TC 30.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai lebih dari target yang diharapkan disebabkan indikator yang di survei memiliki nilai rata-rata pelayanan di atas nilai harapan.

TABEL TC-30. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RESTRA OPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			74	77	80	81	75,86	79,92	81,25	81,55	
2	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi			100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan isu-isu strategis dalam memproyeksi kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan karena isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas organisasi.

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Maritengngae bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Lingkup analisis Kinerja pelayanan di Kecamatan Watang Pulu meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1) Lingkungan Internal

Peluang:

1. Visi dan Misi Organisasi yang jelas;
2. Kekuatan Hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan;
4. Kewenangan koordinasi ditingkat Kecamatan; dan
5. Adanya sarana dan prasarana.

Tantangan:

1. Kualitas SDM yang belum memadai;
2. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan Kecamatan yang diakibatkan belum jelasnya target sasaran yang merupakan ukuran pencapaian yang ingin dicapai; dan
3. Belum optimalnya data-data kondisi ekonomi sosial dan budaya yang menjadi bahan analisis dalam perumusan perencanaan ditingkat Kecamatan.

2) Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
2. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik

3. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada diwilayah dengan Kecamatan
4. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
5. Diklat peningkatan kualitas aparatur
6. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
7. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Tantangan:

1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
2. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
3. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
5. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Maritengngae berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Maritengngae.

Tahun anggaran 2023 Kantor Kecamatan Maritengngae merencanakan 4 (empat) program, yaitu :

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Review terhadap rancangan awal RKPD perlu dilakukan untuk mengukur kesesuaian Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan organisasi. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel TC 31.

TABEL TC-31. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN					7.852.865.300					8.084.155.000	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Maritenggae	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	8.985.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Maritenggae	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	8.985.000	
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Maritenggae	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	8.985.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Maritenggae	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	8.985.000	
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Maritenggae	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	5.963.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Maritenggae	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	5.963.000	
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Maritenggae	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	3.022.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Maritenggae	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	3.022.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	1.310.955.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	1.568.591.500	
2.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	1.672.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	1.672.000	
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Maritengngae	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.672.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Maritengngae	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.672.000	
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	1.309.283.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	1.566.919.500	
2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Maritengngae	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	375.002.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Maritengngae	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	1.098.610.000	
2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Maritengngae	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.652 orang	932.609.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Maritengngae	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.652 orang	466.637.500	
2.2.4	Evaluasi Kelurahan	Kec. Maritengngae	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	1.672.000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Maritengngae	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	1.672.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Maritengngae	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	4.932.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Maritengngae	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	4.932.000	
3.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Maritengngae	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	4.932.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Maritengngae	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	4.932.000	
3.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Maritengngae	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	1.644.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Maritengngae	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	5 Dokumen	1.644.000	
3.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Maritengngae	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5 Dokumen	1.644.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Maritengngae	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5 Dokumen	1.644.000	
3.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Maritengngae	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	1.644.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Maritengngae	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	1.644.000	
4.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Maritengngae	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	6.527.993.300	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Maritengngae	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	6.501.646.500	

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.500.666.800	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.033.195.000	
4.1.1	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Maritengngae	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	4.500.666.800	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Maritengngae	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5.033.195.000	
4.2.	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	76.998.000	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	91.285.000	
4.2.1	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Maritengngae	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	756.000	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Maritengngae	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	756.000	
4.2.2	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Unit	-	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Unit	-	
4.2.3	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Maritengngae	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	95 Unit	1.844.000	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	95 Unit	2.157.000	
4.2.4	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Maritengngae	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11.457 Lembar	7.655.000	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan	11.457 Lembar	7.655.000	
4.2.5	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Maritengngae	Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	18.619.000	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Maritengngae	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 Bulan	18.619.000	
4.2.6	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Maritengngae	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Kali	48.124.000	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Maritengngae	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55 Kali	62.098.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	408.214.300	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	241.675.600	
	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Maritengngae	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	62.696.800	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Maritengngae	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	-	
	XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	211.104.500	XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	67.343.500	
4.3.1	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	55 Unit	134.413.000	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	55 Unit	174.332.100	
4.4	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	490.055.000	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	570.529.200	
4.4.1	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Maritengngae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850 Lembar	8.980.000	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Maritengngae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850 Lembar	11.660.000	
4.4.2	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Maritengngae	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	85.617.000	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Maritengngae	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	66.746.000	
4.4.3	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Maritengngae	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	395.458.000	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Maritengngae	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	492.123.200	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.052.059.200	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	564.961.700	
4.5.1	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Maritengngae	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	46.826.100	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Maritengngae	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	52.830.600	
4.5.2	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	2.900.000	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	2.900.000	
4.5.3	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.002.333.100	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	509.231.100	
4.5.4	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	- Unit	-	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	- Unit	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Maritengngae pada tahun perencanaan 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan;
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah;
- d. Menurunnya tingkat kemiskinan;
- e. Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan;
- f. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas;
- g. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- h. Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah;
- i. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- j. Meningkatnya kualitas pelayanan public;
- k. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- l. Terwujudnya desa maju dan mandiri;
- m. Meningkatnya kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang maka semua hal tersebut di atas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Dan sehubungan bahwa Kecamatan Maritengngae bukanlah Perangkat Daerah pengemban delegasi yang menangani teknis pelaksana usulan masyarakat maka dalam Renja Kecamatan Maritengngae ini tidak terdapat usulan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel TC 32.

**TABEL TC-32. USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

- **PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan:**

Sasaran PN1 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industry pengolahan, (e) kontribusi PDB industry pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industry pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

- **PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan:**

Sasaran PN2 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan dan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;

2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.
- **PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**
Sasaran PN3 adalah sebagai berikut:
 1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 2. Meningkatnya perlindungan social bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan social, BAB IV 18 dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan social pemerintah;
 3. Terpenuhiya layanan dasar bidang kesehatan dan Pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;
 4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
 5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
 6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.

PN 4: Revolusi Mental; dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN4 adalah sebagai berikut:

1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN5 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/ 100 Km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), (c) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara;
3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan system angkutan umum massal perkotaan yang

- dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sector energi (juta ton);
 5. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Sasaran PN6 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
3. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran PN7 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi public terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
3. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan public nasional;

5. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

3.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik
2. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru
4. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah
6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah
7. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga
8. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan
9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat
10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam, pengembangan ekonomi maritim, dan pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 disusun berdasarkan arah kebijakan pada Perubahan RPJMD. Arah kebijakan Pembangunan 2023 mengacu pada arah kebijakan Perubahan RPJMD 2018- 2023 sebagaimana pada table berikut:

1. Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik
2. Penyediaan infrastruktur sumberdaya air
3. Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah

4. Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata;
5. Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata
6. Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya
7. Akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi
8. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar
9. Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak
10. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan
11. Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggarana keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-sehari
12. Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dan kemaritiman
13. Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan
14. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon

3.1.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati dan Wakil Bupati dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan:

1. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
2. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021;
3. Prioritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023;

4. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
5. RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032;
6. Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 (kelima) atau merupakan tahun akhir dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun Visi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi, yakni “Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan Masyarakat yang Religius, Aman, Adil, dan Sejahtera. Kelima pokok visi tersebut yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Sebagai upaya mewujudkan visi maka dirumuskan Misi yang berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur. Untuk mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera, maka upaya yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.

6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 diarahkan untuk menyelesaikan janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang belum tuntas sampai dengan periode tahun 2018-2023 sesuai dengan visi dan misi yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 adalah ***“Pemantapan daya saing dan pembangunan manusia yang mandiri menuju masyarakat yang sejahtera”***. Dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan;
- b. Penguatan perekonomian daerah;
- c. Peningkatan Investasi dan daya saing pariwisata daerah;
- d. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan;
- e. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;
- f. Pengembangan kawasan pedesaan;
- g. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman.

Perumusan isu strategis Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi Tahun 2022, arah kebijakan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, arah kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan arah kebijakan RKP Tahun 2023 serta memperhatikan dinamika isu strategis global, nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Maritengngae

Tujuan Rencana Kerja adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Untuk mencapai misi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 yang akan diwujudkan oleh Kantor Camat Maritengngae sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana pencapaian misi tersebut maka Kantor Camat Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan tahun yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

Selanjutnya tujuan dan sasaran Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kerjanya disajikan pada table 1 berikut ini:

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Target Kinerja 2023
Unsur Kewilayahan			
Tujuan; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	81,55
Sasaran 1; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100 \%$	100%
Sasaran 2; Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100 \%$	100%
Sasaran 3; Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kecamatan Maritengngae dimana pada tahun 2023 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 81,55 persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan dengan baik dengan nilai 100%, dan persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2023 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 33 sedangkan uraian per unit organisasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

TABEL TC-33. RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7			Unsur Kewilayahan								
7	.01		Kecamatan								
7	.01	.02									
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Maritenggae	100%	3.780.000	DAU		100%	42.195.000
7	.01	.02	2.04								
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Maritenggae	100%	3.780.000	DAU		100%	42.195.000
7	.01	.02	2.04	.02							
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec.Maritenggae	1 Laporan	1.904.000	DAU		1 Laporan	21.097.500
7	.01	.02	2.04	.03							
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Maritenggae	1 Laporan	1.876.000	DAU		1 Laporan	21.097.500
7	.01	.03									
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan	Kec. Maritenggae	100%	1.568.591.500	DAU		100%	1.705.200.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemberdayaan							
7	.01 .03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Maritengngae	100%	1.672.000	DAU		100%	7.700.000
7	.01 .03 2.01 .03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Maritengngae	1 Laporan	1.672.000	DAU		1 Laporan	7.700.000
7	.01 .03 .2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Maritengngae	100%	1.566.919.500	DAU		55%	1.697.500.000
7	.01 .03 .2.02 .02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Maritengngae	23 Unit	1.098.610.000	DAU		19 Unit	625.000.000
7	.01 .03 .2.02 .03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Maritengngae	1.652 orang	466.637.500	DAU		1900 orang	1.070.000.000
7	.01 .03 .2.02 .04	Evaluasi Kelurahan	Kec. Maritengngae	7 Laporan	1.672.000	DAU		7 Laporan	2.500.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	.01 .06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kec. Maritengngae	100%	4.932.000	DAU	100%	4.932.000
7	.01 .06 .2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kec. Maritengngae	100%	4.932.000	DAU	100%	4.932.000
7	.01 .06 .2.01 .03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Maritengngae	5 Dokumen	1.644.000	DAU	5 Dokumen	3.500.000
7	.01 .06 .2.01 .07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Maritengngae	5 Dokumen	1.644.000	DAU	5 Dokumen	3.500.000
7	.01 .06 .2.01 .11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Maritengngae	5 Dokumen	1.644.000	DAU	5 Dokumen	3.500.000
X		X							
X	XX		XX						
X	XX 01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kec. Maritengngae	100%	6.501.646.500	DAU	100%	8.164.590.000
X	XX 01 2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Maritengngae	100%	5.033.195.000	DAU	100%	5.201.577.058

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
X	XX	01	2.02	.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Maritengngae	14 Bulan	5.033.195.000	DAU		14 Bulan	5.201.577.058
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Maritengngae	100%	91.285.000	DAU		100%	117.338.340
X	XX	01	2.06	.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Maritengngae	1 Paket	756.000	DAU		1 Paket	1.000.000
X	XX	01	2.06	.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Maritengngae	- Unit	-	DAU		0 Unit	-
X	XX	01	2.06	.04	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Maritengngae	95 Unit	2.157.000	DAU		84 Unit	2.878.962
X	XX	01	2.06	.05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Maritengngae	11.457 Lembar	7.655.000	DAU		11.200 Lembar	6.727.408
X	XX	01	2.06	.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Maritengngae	12 Bulan	18.619.000	DAU		12 Bulan	20.399.470
X	XX	01	2.06	.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Maritengngae	55 Kali	62.098.000	DAU		70 Kali	86.332.500
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Maritengngae	100%	241.675.600	DAU		100%	195.038.770

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
X	XX	01	2.07	.05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Maritengngae	0 Paket	-	DAU		0 Paket	-
X	XX	01	2.07	.09	XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Maritengngae	2 Unit	67.343.500	DAU		1 Unit	30.000.000
X	XX	01	2.07	.10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Maritengngae	55 Unit	174.332.100	DAU		42 Unit	165.038.770
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritengngae	100%	570.529.200	DAU		100%	2.219.891.836
X	XX	01	2.08	.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Maritengngae	850 Lembar	11.660.000	DAU		860 Lembar	49.241.500
X	XX	01	2.08	.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Maritengngae	12 Bulan	66.746.000	DAU		12 Bulan	104.471.000
X	XX	01	2.08	.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Maritengngae	12 Bulan	492.123.200	DAU		12 Bulan	2.066.179.336
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritengngae	100%	564.961.700	DAU		100%	430.847.150
X	XX	01	2.09	.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Maritengngae	35 Unit	52.830.600	DAU		35 Unit	80.393.640

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
X	XX	01	2.09	.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Maritengngae	14 Unit	2.900.000	DAU		6 unit	5.000.000
X	XX	01	2.09	.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Maritengngae	6 Unit	509.231.100	DAU		5 unit	345.453.510
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kec. Maritengngae	- Unit	-	DAU		0 unit	-
J U M L A H									8.084.155.000				9.922.588.154

4.2. Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Maritengngae Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan
2.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan
2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2.2.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
3.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
4.1	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.1.1	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.2.	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.2.1	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
4.2.2	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
4.2.3	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
4.2.4	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
4.2.5	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.2.6	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.3	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.3.1	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
4.3.2	XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
4.3.3	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
4.4	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.4.1	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.4.2	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.4.3	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran
4.5	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.5.1	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
4.5.2	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
4.5.3	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
4.5.4	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara

Selanjutnya pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Maritengngae disajikan pada table 3 berikut ini:

Tabel 3. Formulasi pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Maritengngae

No.	Program	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Target Kinerja 2023
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pelayanan Publik yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Urusan Pelayanan Publik}} \times 100 \%$	100%
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan}}{\text{Jumlah Masyarakat Desa dan Kelurahan Produktif}} \times 100 \%$	52%
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	100%
4.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	$\frac{\text{Jumlah Layanan Administrasi yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Layanan Administrasi}} \times 100 \%$	100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2023, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maritengngae dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Maritengngae sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maritengngae;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Maritengngae;
4. Kecamatan Maritengngae berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Maritengngae Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Semoga dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.